

ILMU DAN KEKUASAAN: ULAMA DAN POROS-POROS POLITIK

Oleh:

Dr. Muhammad Basri, MA

A. Pendahuluan

Ulama merupakan tokoh atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dengan baik. Ulama sebagai figur dan tauladan bagi orang-orang disekitarnya, dan secara umum ulama adalah tempat bertanya serta mengetahui berbagai ilmu sesuai dengan bidang ulama tersebut. Politik merupakan sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan, dari jenisnya politik terbagi dua yaitu politik yang bertujuan baik dan politik yang bertujuan tidak baik. Bagaimana ulama yang berkecimpung di dunia politik, apakah pantas bagi mereka, sehingga dalam tulisan ini dikaji dengan tema Ulama dan Politik.

Pertanyaannya adalah, apakah ulama diharuskan berkuasa, berpolitik secara praktis, atau hanya menjadi penengah dalam kontestasi politik?

B. Pengertian ulama

Kata ulama' bentuk jama' dari kata *al aliim*, yang berarti memiliki pengetahuan. Selain bentuk jama' dari *al aliim*, juga diambil dari kata *al alim* yang berarti mengetahui secara jelas. Penggunaan kata *al ulama'* dalam al-Qur'an selalu diawali dengan ajakan untuk merenungi keadaan alam, sedangkan kata *al alimun* merenungi peristiwa yang sudah terjadi sebagai bahan evaluasi. Adapun penggunaan kata *al alim* dalam bentuk tunggal semuanya mengacu hanya kepada Allah, dan selalu diiringi dengan penciptaan bumi dan langit serta hal-hal yang gaib dan yang nyata.

Kedudukan dan kemuliaan para ulama' telah diabadikan didalam Al- Qur'an, surat *Al-Faathir* ayat 28 yang berbunyi: " Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-

hamba-Nya, hanyalah *ulama*. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa ulama' merupakan orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syari'at. Luas tidaknya pengetahuan seorang ulama' akan menentukan kadar ketakutannya kepada Allah. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah termasuk menjadi pemimpin atau penguasa.

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab "alim" yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu, lawan kata ilm (Ilmu) adalah jahil (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama. Pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu – ilmu agama. Pada masa al-Khulafaur-Rasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan kealaman, dan pemisahan politik praktis. Para sahabat Nabi saw umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut *Ahl al-Halli wa al-Aqd*. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.

Baru pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan sesudahnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya ahli fiqh disebut fuqaha, ahli hadits disebut muhaddisin, ahli kalam disebut mutakallim, ahli tasawuf disebut mutasawwif, ahli tafsir disebut mufassir. Sementara itu orang yang memiliki ilmu kealaman tidak lagi disebut dengan ulama, tetapi disebut ahli dalam bidang masing-masing.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama lebih menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu

keagamaan dalam bidang fiqih, di Indonesia ulama identik dengan fuqaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja.

Betapapun semakin sempit pengertian ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam jangka *khasyyah* (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah swt.

Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia. Di Aceh disebut Teungku, di Sumatera Barat disebut Tuanku atau Buya, di Jawa Barat disebut Ajengan, Jawa tengah dan Jawa Timur Kiyai, Banjar (Kalimantan Selatan) sulawesi dan NTT disebut Tuanku Guru.

Ulama bentuk jamak dari alim “terpelajar” (cendikiawan) orang-orang yang diakui sebagai cendikiawan atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung) para hakim, guru-guru agama pada Universitas dan secara umumnya merupakan lembaga kelompok terpelajar atau kalangan cendikiawan kelslaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan. Khususnya dalam sistem monarkis yang turun-temurun. Para penguasa dikukuhkannya melalui keputusan dewan ulama. Untuk menguatkan kekuasaannya dalam memegang tampuk pemerintahan. Ulama selalu memegang legitimasi dalam urusan pemerintahan dan keagaamaan.

Ulama dalam arti luas adalah kaum cerdik-cendikia dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Sejalan dengan kelengkapan ajaran al-Qur’an dan sunnah yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka para ulama (dalam pengertian luas) dan lebih-lebih ulama dalam pengertia sempit yaitu yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu agama. Secara jama’i dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menuju perkembangan hidup yang sehat, sejalan dengan nilai-nilai ajaran al-Qur’an dan Sunnah.

C. Pengertian kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok. guna menjalankannya sesuai dengan aturan yang ada, kekuasaan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya.

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah.

D. Ulama dan kekuasaan

Otoritas keagamaan ulama yang dikenal sebagai mujtahid atau penterjemah hukum-hukum agama (syariat), dikembangkan secara luas melalui klaim bahwasanya mereka memiliki hak mengambil keputusan secara independen dan hak menafsirkan permasalahan agama berdasarkan pencapaian intelektual dan spiritual mereka. Otoritas ulama juga dikembangkan secara luas melalui klaim bahwasanya, dalam ketidakhadiran imam atau pimpinan sejati ummat muslim, mereka merupakan orang – orang yang paling saleh dan sekaligus sebagai pemimpin spiritual dan menjadi kewajiban bagi muslim awam menjadikan mereka sebagai pembimbing spiritualitas yang absolute (marja'i taqlid).

Ulama juga memperkokoh jalinan mereka dengan masyarakat umum melalui penanganan peradilan, dan santunan, dan harta waqaf, dan dengan memimpin shalat jama'ah dan berbagai upacara perayaan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Jalinan mereka dengan sejumlah besar para artisan, kaum pekerja (buruh), dan elit pedagang

sangat besar pengaruhnya.

Pengaruh ulama dalam bidang politik dapat kita lihat dalam keterangan Ira M Lapidus yang mencontohkan di Negara Qatar, bahwa pertalian ulama dengan rezim Qatar tidak jelas. Di balik melemahnya rezim Qatar, terdapat preseden sejarah yang berharga berupa kalaborasi antara elit Negara dan elit ulama. Kalangan ulama secara kuat terpengaruh kepada tradisi ketidak pedulian (Quitisme) dan penghindaran diri terhadap keterlibatan secara aktif dalam urusan politik.

Etos mereka menghendaki pemusatan pada permasalahan teologis dan urusan keagamaan dan penghormatan terhadap otoritas Negara dalam seluruh aspeknya, dan mereka bergantung kepada Negara untuk pelimpahan jabatan tertentu, untuk mendapatkan tunjangan, pemberian tanah, dan untuk sekolah – sekolah. Fath ali Shah (1797-1834), yang secara kritis menyandarkan kekuasaan pada beberapa kekuatan kesukuan, membangun sejumlah makam suci, mengangkat ulama untuk beberapa jabatan pemerintahan, dan menghormati mereka sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat. Ia mentolerir independensi ulama-ulama besar dari kalangan bangsawan, misalnya Sayyid Muhammad Baqir di Isfahan, yang pengaruhnya didasarkan pada kekayaan atas sejumlah tanah, penguasaannya atas harta kekayaan agama, dan dukungan dari tokoh – tokoh kuat tentara.

Seperti yang dinyatakan di atas, peran ulama dalam politik pertama kali dapat ditelusuri ke zaman awal-awal perkembangan Islam, sesaat setelah Rasulullah saw. meninggal dunia. Momentum peran ulama dalam politik baru terlihat setelah Rasulullah saw. meninggal dunia. Hal ini dikarenakan di dalam Islam, Rasulullah memegang jabatan sebagai pemimpin agama dan politik, meski tentu saja dalam kebijakan politik beliau terdapat kesempatan bagi para ulama untuk berpartisipasi.

Akan tetapi satu hal perlu ditegaskan di sini bahwa pada masa Rasulullah, predikat ulama jarang terdengar, karena seluruh urusan agama dikembalikan kepada beliau. Term ulama baru mulai berkembang setidaknya setelah rasul meninggal dunia.

Start point yang paling mudah ditelusuri tentang peran ulama dalam politik

adalah pengangkatan Abu Bakar. Yakni berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat untuk memilih pengganti rasul. Akan tetapi hal ini juga merupakan polemik tersendiri, karena dalam sumber-sumber sejarah tidak ditemukan bahwa mereka yang terlibat dalam peristiwa saqifah disebut sebagai ulama, meski nantinya mereka mendapat gelar tersebut. Mereka yang ikut terlibat dalam Saqifah dan tokoh yang disebut-sebut dalam hubungannya dengan peristiwa Saqifah seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan para pemimpin dari kelompok Anshor dan Muhajirin tidak disebut sebagai ulama.

Pekembangan selanjutnya yang selalu menjadi perhatian para pakar sejarah Islam adalah terbentuknya Ahl Halli wa Aqdi yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar menjelang wafat ummat Islam menyarankan untuk memilih Khalifah sebagai pengganti. Karena itu beliau mengambil jalan tengah, antara menunjuk dan tidak. Beliau menunjuk enam orang Sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga, dan mereka adalah orang-orang terbaik, pun ditinjau dari sifat kedudukan masing-masing mereka pastilah orang yang akan menjadi Khalifah dan itu harus dipilih diantara mereka. Diantara mereka berenam yaitu : Usman ibnu 'Affan, Ali ibnu Abi Thalib, Thalhah, Zubair ibnu Awwam, Sa'ad ibnu Abi Waqqash dan Abdurrahman ibnu "Auf.

Sekali lagi, dalam sumber-sumber sejarah tidak ada yang menyebutkan mereka sebagai ulama, akan tetapi menurut analisa awal penulis, bahwa selain mereka nantinya disebut sebagai ulama, kepada merekalah ummat Islam mengadakan masalah-masalah keagamaan mereka.

Peran ulama dalam politik dalam Islam sangat signifikan. Ulama telah berhasil menyentuh tataran tertinggi dalam politik praktis pada masa klasik, di mana peran mereka sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin negara. Peran ulama dalam politik sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa kebanyakan ulama pada masa sebelum terbentuknya Dinasti Umayyah adalah seorang politikus, seperti Ali, Umar, Utsman, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin Ash, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Abdullah bin Zubeir dan sebagainya.

Peran mereka terlihat dalam pengambilan keputusan penting negara, seperti penentuan ekspansi, kebijakan keuangan negara, peperangan. Bahkan untuk beberapa tokoh, seperti Abdullah bin Zubeir, Amr bin Ash malah terlibat kudeta militer terhadap pemerintahan Ali.

Perubahan besar terjadi pada pemerintahan Dinasti Umayyah. Pada masa ini terjadilah pemisahan antara kekuasaan, kerajaan, kedaulatan atau politik dengan agama. Politik diurus oleh para khalifah sedangkan agama diurus oleh ulama. Keinginan pemisahan dua bidang yang berbeda ini sebenarnya telah muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yakni ketika Umar mengatakan kepada Ali bahwa bila agama selalu diurus oleh Bani Hasyim, maka seharusnya kedaulatan politik diurus oleh selain Bani Hasyim.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah terjadi penyempitan peran ulama yang hanya membidangi masalah agama. Dengan begitu, pegertian ulamapun semakin menyempit yakni orang yang membidangi masalah agama saja. Meski ada dampak positifnya, yakni berkembangnya khazanah keilmuan Islam seperti dalam bidang tafsir, hukum dan hadis, pemisahan ini mempunyai dampak negatif yakni terlepasnya pemerintahan dari nilai-nilai pemerintahan Rasul dan Khalifah rasyidah yang diklaim sebagai sistem pemerintahan Islam. Pemerintahan Islampun langsung berubah menjadi monarkhi, tidak ada seleksi pemelihan pemimpin, tidak ada fit dan proper test.

Namun meski demikian, peran ulama dalam politik tidak begitu saja hilang. Untuk mencapai status legal bentuk monarkhi, Dinasti Umayyah harus membujuk para ulama untuk meyakinkan masyarakat bahwa monarkhi merupakan sistem yang diperbolehkan dalam Islam. Peran ulama pada masa ini hanya terbatas pada pelegislasian dan meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan pemerintahan adalah sah menurut Islam.

Pada masa pemerintahan selanjutnya, yakni pada dinasti Abbasiyah, corak politik tidak jauh berbeda. Bahkan pada masa dinasti ini, ada dualistik peradilan yakni pemisahan antara peradilan administrasi negara dan peradilan agama. Peradilan

administrasi negara yang berhubungan erat dengan politik diurus oleh pemerintah yang diwakilkan kepada orang pemerintahan yang ditunjuk khalifah, sementara peradilan agama diwakilkan kepada ulama yang ditunjuk oleh khalifah.

Sekali lagi peran ulama terlihat pada masa pemerintahan al-Ma'mun dan khalifah setelahnya, ketika khalifah al-Ma'mun sangat menyukai mazhab Mu'tazilah. Pada saat inilah, para ulama Mu'tazilah memberi warna yang sangat besar dalam pemerintahan al-Ma'mun, hingga terjadinya perpecahan dalam tubuh ummat Islam, ketika kaum Mu'tazilah memaksakan fahamnya dengan jalan politik kepada orang lain.

Pada masa-masa selanjutnya, para ulama semakin tersingkir dari dunia politik. Terutama pada masa-masa kejumudan pemikiran Islam. Di mana para ulama sibuk dengan perdebatan tentang pemikiran tokoh-tokoh pendahulu, tidak ada kreatifitas hanya sibuk memperdebatkan masalah pemikiran tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia.

E. Posisi Ulama Terhadap Politik Praktis (Dua Kasus Ulama Yang Terlibat Politik Dan Menghindari Politik)

1. Ulama Yang Terlibat Politik

a. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

a. 1. Biografi

Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di [Minangkabau](#), [Sumatera](#) Barat. Ia lahir sebagai anak pertama dari tujuh orang bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran [Islam](#). Ayahnya bernama [Abdul Karim Amrullah](#), ulama pembaru Islam di Minangkabau yang akrab dipanggil dengan sebutan Haji Rasul, sementara ibunya, Sitti Shafiyah, berasal dari keturunan seniman di Minangkabau. Adapun ayah dari Abdul Karim, kakek Hamka, yakni [Muhammad Amrullah](#) dikenal sebagai ulama pengikut [Tarekat Naqsyabandiyah](#).

a. 2. Pendidikan Hamka

Pada tahun 1915, setelah usianya genap tujuh tahun, ia dimasukkan ke sebuah [Sekolah Desa](#) dan belajar ilmu pengetahuan umum seperti berhitung dan membaca di sekolah tersebut. ia juga belajar di [Diniyah School](#) setiap sore, belajar ke [Thawalib](#) oleh ayahnya pada tahun 1918.

Pada tahun 1922 HAMKA sempat belajar kepada [Syekh Ibrahim Musa](#), tetapi tidak berlangsung lama. Ia lebih memilih mengikuti kata hatinya untuk menuntut ilmu dan pengalaman menurut caranya sendiri. Ia memutuskan untuk bertolak ke pulau [Jawa](#).

a. 3. Peran Politik Hamka

Sejak masih muda, Hamka telah terlibat dalam aktivitas politik, yaitu ketika menjadi anggota [Sarekat Islam](#) pada tahun 1925 dan, setelah [kemerdekaan](#) ia aktif dengan [Partai Masyumi](#). Pada [pemilihan umum 1955](#), ia terpilih menjadi anggota [Dewan Konstituante](#) mewakili [Jawa Tengah](#). Akan tetapi pengangkatan tersebut ditolak karena merasa tempat tersebut tidak sesuai baginya. Atas desakan kakak iparnya, [Ahmad Rasyid Sutan Mansur](#), akhirnya Hamka menerima pengangkatan tersebut.

Di Konstituante, ia bersama [Mohammad Natsir](#), [Mohammad Roem](#), dan [Isa Anshari](#) menjadi pihak yang paling konsisten memperjuangkan [syariat Islam](#) menjadi dasar negara [Indonesia](#). Dalam pidatonya, Hamka mengusulkan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kembali kalimat tentang "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", sebagaimana yang termaktub dalam [Piagam Jakarta](#). Akan tetapi, pemikiran Hamka ditentang keras oleh sebagian besar anggota Konstituante, yang umumnya berasal dari pihak komunis. Selanjutnya, dalam sidang Konstituante di [Bandung](#) pada tahun 1957, ia menyampaikan pidato penolakannya atas gagasan Presiden Soekarno yang akan menerapkan [Demokrasi Terpimpin](#). Namun, segala usahanya itu kandas setelah Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui [Dekrit Presiden](#) pada 5 Juli 1959 dan, perjalanan politik Hamka dapat dikatakan berakhir setelah Masyumi ikut dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Sikapnya yang konsisten terhadap agama, menyebabkannya acapkali

berhadapan dengan berbagai rintangan, terutama terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Keteguhan sikapnya ini membuatnya dipenjarakan oleh [Soekarno](#) dari tahun [1964](#) sampai [1966](#). Pada awalnya, Hamka diasingkan ke [Sukabumi](#), kemudian ke [Puncak](#), [Megamendung](#), dan terakhir dirawat di rumah sakit Persahabatan Rawamangun, sebagai tawanan. Di dalam [penjara](#) ia mulai menulis *Tafsir al-Azhar* yang merupakan [karya ilmiah](#) terbesarnya. Pada tahun 1977, Hamka dipilih sebagai ketua umum [Majelis Ulama Indonesia](#) yang pertama. Semasa jabatannya, Hamka mengeluarkan fatwa yang bersisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan [RUU Perkawinan](#) tahun [1973](#), dan mengecam kebijakan diperbolehkannya merayakan Natal bersama umat Nasrani. Meskipun pemerintah mendesaknya untuk menarik kembali fatwanya tersebut dengan diiringi berbagai ancaman, Hamka tetap teguh dengan pendiriannya. Akan tetapi, pada tanggal [24 Juli 1981](#), Hamka memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia, karena fatwanya yang tidak kunjung dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

b. Mohammad Natsir

b. 1. Biografi Muhammad Nasir

Mohammad Natsir dilahirkan di [Alahan Panjang](#), [Lembah Gumanti](#), [kabupaten Solok](#), [Sumatera Barat](#) pada [17 Juli 1908](#) dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah. Ia memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan seorang ulama. Ia kelak menjadi pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari [Maninjau](#), [Tanjung Raya](#), [Agam](#) dengan [gelar](#) *Datuk Sinaro nan Panjang*.

Natsir mulai mengenyam pendidikan di [Sekolah Rakyat](#) Maninjau selama dua tahun, kemudian pindah ke [Hollandsch-Inlandsche School](#) (HIS) di [Padang](#). Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke [Solok](#) dan dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Selain belajar di HIS di Solok pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama

[Islam](#) di Madrasah Diniyah pada malam hari. Tiga tahun kemudian, ia kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di [Meer Uitgebreid Lager Onderwijs](#) (MULO) lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti *Pandu Nationale Islamietische Pavinderij* dan *Jong Islamieten Bond*.

Setelah lulus dari MULO, ia pindah ke [Bandung](#) untuk belajar di [Algemeene Middelbare School](#) (AMS) hingga tamat pada tahun 1930. Dari tahun 1928 sampai 1932, ia menjadi ketua *Jong Islamieten Bond* (JIB) Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan [guru](#) selama dua tahun di [perguruan tinggi](#). Ia yang telah mendapatkan pendidikan [Islam di Sumatera Barat](#) sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung, termasuk dalam bidang [tafsir Al-Qur'an](#), [hukum Islam](#), dan [dialektika](#). Kemudian pada tahun 1932, Natsir berguru pada [Ahmad Hassan](#), yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam [Persatuan Islam](#).

Pada 20 Oktober 1934, Natsir menikah dengan Nurnahar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Natsir dikaruniai enam anak. Natsir juga diketahui menguasai berbagai bahasa, seperti [Inggris](#), [Belanda](#), [Perancis](#), [Jerman](#), [Arab](#), dan [Esperanto](#). Natsir juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan [Douwes Dekker](#), yakni bermain musik. Natsir suka memainkan [biola](#) dan Dekker suka bermain [gitar](#). Mohammad Natsir juga sering berbicara dengan [Bahasa Belanda](#) dengan Dekker dan sering membicarakan [musik](#) sekelas [Ludwig van Beethoven](#) dan novel sekelas [Boris Leonidovich Pasternak](#), novelis kenamaan [Rusia](#) pada masa itu. Kedekatannya dengan Dekker, menyebabkan Dekker mau masuk [Masyumi](#). Ide-ide Natsir dengan Dekker tentang perjuangan, [demokrasi](#), dan keadilan memang sejalan dengan Natsir.

Ia meninggal pada 6 Februari 1993 di [Jakarta](#), dan dimakamkan sehari kemudian.

b. 2. Perjuangan Politik Muhammad Natsir

Natsir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam, seperti [Agus Salim](#); selama pertengahan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara demi masa depan [pemerintahan Indonesia](#) yang dipimpin [Soekarno](#). Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia, dan diangkat sebagai pimpinan untuk

cabang [Bandung](#) dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama [pendudukan Jepang](#), ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia lalu berubah menjadi [Majelis Syuro Muslimin Indonesia](#) atau Masyumi, dan diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 sampai ketika Masyumi dan [Partai Sosialis Indonesia](#) dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

Setelah [Proklamasi Kemerdekaan Indonesia](#), ia menjadi anggota [Komite Nasional Indonesia Pusat](#). Sebelum menjadi [perdana menteri](#), ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan [Mosi Integral Natsir](#) dalam sidang pleno parlemen. Mohammad Hatta sebagai [Wakil Presiden Indonesia](#) yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam [Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) yang sebelumnya berbentuk [serikat](#), sehingga ia diangkat menjadi [perdana menteri](#) oleh Presiden Soekarno pada [17 Agustus 1950](#). Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan [Soekarno](#), Soekarno yang menganut paham [nasionalisme](#) mengkritik Islam sebagai [ideologi](#) seraya memuji [sekularisasi](#) yang dilakukan [Mustafa Kemal Atatürk](#) di [Kesultanan Utsmaniyah](#), sedangkan Natsir menyangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi.

Natsir juga mengkritik [Soekarno](#) bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar [Pulau Jawa](#). Menurut [Hatta](#), sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku presiden sekaligus ketua [Partai Nasionalis Indonesia](#) (PNI) terus mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan [Kabinet Natsir](#), dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.

Selama era [demokrasi terpimpin](#) di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan [Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia](#) setelah meninggalkan [Pulau Jawa](#); PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas disalahtafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di [Malang](#) dari tahun 1962

sampai 1964, dan dibebaskan pada masa [Orde Baru](#) pada tanggal 26 Juli 1966. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam, seperti Majelis Ta'sisi Rabitah Alam Islami dan Majelis Ala al-Alami lil Masjid yang berpusat di [Mekkah](#), Pusat Studi Islam Oxford (*Oxford Centre for Islamic Studies*) di [Inggris](#), dan Liga Muslim se-Dunia (*World Muslim Congress*) di [Karachi, Pakistan](#).

Di era [Orde Baru](#), ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani [Petisi 50](#) pada 5 Mei 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Di masa-masa awal Orde Baru ini, ia berjasa mengirim nota kepada [Tunku Abdul Rahman](#) dalam rangka mencairkan hubungan dengan [Malaysia](#). Selain itu pula, dialah yang mengontak pemerintah [Kuwait](#) agar menanam modal di [Indonesia](#) dan meyakinkan pemerintah [Jepang](#) tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi.

[Soeharto](#) menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani Petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen [Ali Sadikin](#), [Sanusi Hardjadinata](#), [SK Trimurti](#), dan lain-lain. Akibat dilarangnya ia pergi ke luar negeri, banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan [Soeharto](#) terhadap [partai-partai](#), terutama partai Islam. Apalagi [Opsus](#) (Operasi Khusus) yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto juga ikut dikritisi. Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir dalam memulai hubungan dengan [Malaysia](#) dan [Timur Tengah](#) setelah naiknya Soeharto.

2. Ulama Yang Menghindari Politik

Sahal Mahfuzh

Dr. (HC). KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz (lahir di [Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah](#), [17 Desember 1937](#) – meninggal di [Semarang](#), [24 Januari 2014](#) pada umur 76 tahun) adalah Ketua [Majelis Ulama Indonesia](#) (MUI) sejak tahun 2000 hingga 2010 Sebelumnya selama dua periode menjabat sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014. Kiai Sahal selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005.

Di luar itu, Kiai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda (PMH) sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen Margoyoso (Pati, Jawa Tengah) ini didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam, pada 1910. Selain itu Kiai Sahal adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 hingga ia wafat.

Kiai Sahal biasa menulis namanya secara resmi sebagai HMA. Sahal Mahfudh (menggunakan dh [bukan dz] untuk nama belakang). Tiga huruf paling depan merupakan kependekan dari Haji Muhammad Ahmad. Kiai Sahal mendapatkan gelar doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah (2003).

F. Interaksi Mutual Simbiosis Antara Ilmu dan Kekuasaan

Interaksi berarti saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Kata mutual berasal dari bahasa Inggris yang berarti saling, bersama, saling pengertian, saling setuju, mencapai persamaan. Simbiosis berarti keadaan yang menguntungkan.

Jadi yang dimaksud dengan interaksi mutual simbiosis antara ilmu dan kekuasaan adalah hubungan yang menguntungkan atau saling mempengaruhi antara ilmu dengan kekuasaan. Diantara orang-orang yang banyak ilmunya dalam hal keislaman adalah ulama.

Pengaruh ulama terhadap komunitas besar sekali. Keahlian mereka diakui sebagai pelindung dan pemberi pemahaman teologi (Syari'ah). hal ini lebih nyata terlihat ketika ulama berperan sebagai penuntun spritual, pemimpin upacara keagamaan, dan pemimpin masyarakat. Maka tidaklah mengeherankan jika ulama mengambil posisi yang penting dalam masyarakat. Mereka tidak saja disegani tapi juga dihormati bahkan kharisma dan wibawanya mampu menggerakkan umat untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

Posisi ulama dalam masyarakat derajatnya sangat tinggi. Munir al-Din menjelaskan manusia dapat digolongkan kepada empat tingkatan, yaitu:

- Penguasa atau raja
- Pemilik kebijaksanaan / kearifan
- Orang kaya, dan
- Kelompok menengah.

Dari pengelompokan di atas terlihat kedudukan ulama sangat tinggi dalam masyarakat. Benar kata pepatah yang mengatakan *knowledge is power* (pengetahuan adalah kekuasaan). Dengan ilmu yang ada ulama mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Penghargaan ini didapat oleh ulama karena ketinggian ilmu yang dimilikinya.

Raja-raja bukanlah penguasa yang sebenarnya karena ulama penguasa atas raja. ini membuktikan bahwa pena lebih tajam dari pedang. Selanjutnya tidak sedikit kita ketahui ulama menduduki posisi penting di Istana sebagai pendidik putra-putra raja. kadangkala seorang ulama juga menjadi legitimasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penguasa. Sebagai contoh kelIndonesiaan yang lebih sempit, pemerintah Kota Medan dan Kementerian Agama Kota Medan, sering meminta pendapat kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dalam persoalan agama yang terjadi di masyarakat, misalnya masalah tanah wakaf, perobohan dan pemindahan masjid dan sebagainya.

Ulama sebagai kekuatan sosial yang istimewa. Mereka tidak hanya sebagai juru runding, tetapi juga bertindak sebagai perantara elit penguasa dan penduduk pada umumnya. Ulama sering dijadikan tempat untuk mengadukan permasalahan dan tempat penyelesaian masalah.

G. Pengaruh Aktifitas Politik Ulama di Kalangan Umat

Keterlibatan para kiai atau ulama dalam politik praktis sangat beraneka ragam. Beberapa wujud keterlibatan ulama dalam politik praktis adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan ulama sebagai pengurus struktural partai politik. Keterlibatan ini biasanya ulama secara langsung menjabat sebagai pengurus partai politik baik di tingkat lokal, wilayah, maupun nasional.
2. Keterlibatan ulama sebagai calon legislatif dan eksekutif. Seorang kiai atau ulama dalam hal ini langsung mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik sebagai calon legislatif maupun eksekutif.
3. Keterlibatan kiai dalam dukungan suara dan kampanye. Wujud dukungan suara yang diberikan oleh kiai atau ulama biasanya diberikan kepada calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya kiai secara terbuka mendukung partai politik, calon legislatif, maupun eksekutif. Sedangkan secara tidak langsung, biasanya para politisi memohon sendiri kepada kiai dengan cara minta do'a restunya serta memilih partai politik, calon legislatif, maupun eksekutif yang mereka inginkan. Bahwa bentuk keterlibatan kiai dalam politik lokal adalah sebagai pengurus partai politik, sebagai calon legislatif atau eksekutif dan pendukung calon eksekutif.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kiai/ulama yang semula hanya seorang pengelola pesantren dan pendidik para santri, dapat dibedakan menjadi empat kategori sesuai dengan aktivitasnya. Yaitu, ulama pesantren, ulama tarekat, ulama di panggung, dan ulama politik.

Dalam proses belajar mengajar antara kiai dan santri, mungkin dari ketiga kategori kiai yang pertama yaitu kiai pesantren, kiai tarekat dan kiai panggung tidak akan membawa pengaruh yang signifikan. Namun bagaimana dengan kiai pesantren yang sekaligus terjun dalam politik praktis?

Kita tahu bahwa sekarang banyak kiai pesantren dan ustadz yang ikut dalam politik praktis baik dalam struktural maupun simpatisan. Misalkan saja di daerah rembang. Di situ ada kiai yang terlibat dalam politik praktis, yaitu K.H Maimun Zubaer

yang masuk di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), K.H Abdurrohman Khudlori Magelang yang juga masuk di partai kebangkitan bangsa (PKB), K.H Zainuddin M.Z yang juga mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR), dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Melihat fenomena tersebut, tentunya akan mempengaruhi minat belajar para santrinya yang belajar di pondok pesantren tersebut.

Minat merupakan ukuran senang tidaknya kita melaksanakan sesuatu. Dengan berminat, mereka akan terdorong untuk berbuat. Minat adalah landasan yang paling menentukan demi keberhasilan proses belajar.

Yang terjun dalam politik praktis, dalam proses belajar mengajar tidak mengkondisikan santri pasif, lebih menitik beratkan pada pencapaian target dan kiai sebagai fasilitator dan memanfaatkan banyak sumber belajar serta mengadakan kerjasama dengan lingkungan sekitar. Sedangkan kiai yang tidak ikut terjun dalam politik praktis, dalam proses belajar mengajar mengkondisikan santri pasif, lebih menitik beratkan pada penguasaan materi, kiai sebagai sumber utama dalam proses belajar mengajar.

Suatu penelitian yang pernah dilakukan di di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadin, Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pola keterlibatan kiai dalam politik praktis yang terjadi di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadin dapat dilihat dari keaktifan kiai tersebut dalam partai politik.

Kiai tersebut adalah K.H. Ahmad Nur Khozin dan K.H. Ahmad Sholeh disamping menjabat sebagai pengurus partai politik, mereka juga tercatat sebagai juru kampanye, pendukung calon legislatif, dan pendukung calon eksekutif. (2) Di Pondok Pesantren Ruodlotul Muhtadin terjadi perubahan pola belajar yang diakibatkan oleh keterlibatan para kiaiinya dalam politik praktis, akibatnya adalah:

(a) Pola mengajar yang dilakukan oleh kiai dan ustadz biasanya diampu sendiri tanpa diwakilkan, ketika mereka aktif dalam politik praktis, menjadi diwakilkan kepada santri senior bahkan kadang-kadang diliburkan. (b) Jadwal mengajar para kiai dan ustadz yang biasanya berjalan tertib menjadi kurang tertib. (c) Hubungan antara kiai-santri yang sebelumnya terjalin keakraban menjadi kurang akrab. (d) Pembelajaran ilmu-ilmu agama

menjadi kurang fokus sehingga banyak santri yang lebih memilih belajar ketrampilan, seperti komputer, menjahit, sablon, tilawah, dan pelatihan manajemen. (3) Minat belajar para santri di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadin mengalami beberapa gangguan yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian para pendidik terhadap proses belajar mengajar. Para pendidik lebih sibuk dengan aktivitas politik dibandingkan melaksanakan tugas utamanya yaitu mengajar. Mereka lebih sering keluar untuk mengadakan koordinasi dengan rekan politiknya. pembelajaran sering diliburkan.

H. Analisis Kritis Terhadap Relasi Ulama Dan Politik Praktis

Peran Ulama' dalam Politik

Bagaimana posisi dan peran ulama' dalam berpolitik selalu menjadi perbincangan tanpa henti baik di kalangan ulama' sendiri maupun mereka yang terjun dalam arena politik. Seperti perbincangan-perbincangan lainnya, isu ini menghasilkan dua kelompok; mereka yang membolehkan ulama' masuk dalam lingkungan politik praktis agar dapat memberi warna yang baik, dan kelompok yang berpendapat bahwa sebaiknya ulama' tidak terjun langsung dalam politik sehingga netralitas mereka dapat terjaga. Masing-masing pendapat pasti mempunyai alasan dan bukti yang menurut mereka dapat dijadikan sandaran penting dari pendapat tersebut.

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai peran ulama' dalam politik, ada baiknya kita bersepakat mengenai makna ulama' dan batasan-batasannya secara ringkas. Kesepakatan tersebut menjadi penting mengingat kata ulama' berasal dari Arab dengan kata *al-'ālim*) bisa juga diartikan secara luas, yaitu orang Islam yang mempunyai ilmu. Jika makna ulama' yang luas ini diterapkan, maka akan terdapat banyak golongan dan individu yang masuk dalam golongan ulama' tersebut, termasuk ahli politik muslim dan birokrat muslim, guru dan dosen muslim, dokter muslim dan lain sebagainya. Ulama' yang menjadi landasan wacana dalam makalah ini adalah mereka yang benar-benar mengikhlaskan niat untuk belajar ilmu agama Islam dan menyebarkannya di kalangan ummat Muslim tanpa ada pamrih keduniaan yang diinginkannya. Dengan demikian, tidak semua orang bisa masuk dalam golongan ulama', pun tidaklah mudah seseorang

menganggap dirinya ulama' atau dianggap sebagai ulama' oleh orang lain.

Keengganan ulama' untuk masuk dalam sistem politik yang ada bukanlah gambaran bahwa mereka tidak berpolitik atau menganggap Islam terpisah dengan politik. Semua ulama' tetaplah berpolitik dengan tidak memasuki arena politik praktis. Politik semacam inilah yang tetap menjaga netralitas para ulama' sehingga setiap kata, ucapan dan perbuatannya hanya untuk menegakkan kebenaran (*kalimat al-haqq*) dimana pun dan kapan pun berada. Mereka tidak membela partai A atau B, tidak pula mendukung kelompok dan suku C dan D. Tidak pula mempunyai ambisi pribadi ataupun kelompok untuk mendekati pemimpin sehingga dikenal di masyarakat luas. Bagi mereka, membela kebenaran adalah yang paling utama tanpa melihat siapa yang dibela dan apa yang akan didapatkan. Bahkan, kebenaran tersebut disampaikannya pula di depan pemimpin yang menyimpang sebab itulah seutama-utamanya jihad, terutama bagi para ulama' (*afdal al-jihād kalimat al-haqq tuqālu li imām jā'ir*).

Di samping selalu memberikan saran dan nasehat kepada pemimpin, para ulama' secara aktif ikut serta dalam perbaikan masyarakat luas melalui pendidikan. Mendidik masyarakat secara luas berarti ikut serta bersama masyarakat dalam kehidupan mereka. Mereka dekat dengan masyarakat karena masyarakat selalu merindui kehadirannya. Mendidik juga berarti memperbaiki akhlāq semua lapisan masyarakat, mengingatkan kurang pedulian mereka terhadap nilai-nilai agama dan memberikan perhatian mendalam terhadap segala permasalahan yang menimpa mereka. Dengan berperan aktif dalam perbaikan masyarakat, ulama' sudah mengambil posisi penting dan strategis dalam berpolitik dalam sebuah negara. Keaktifan tersebut bisa menjadi senjata ampuh bagi ulama' untuk mengubah jalannya pemerintahan yang masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan.

Salah satu metode ulama' yang mengutamakan gerakan perbaikan masyarakat direkam dengan cukup baik oleh al-Kīlānī yang mengetengahkan ketokohan Imam al-Ghazālī dan 'Abd al-Qādir al-Jīlānī. Ia menamakannya gerakan pembaharuan dan perbaikan (*harakat al-tajdīd wa al-islāh*). Menurutnya, gerakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut bermula dari pendidikan yang sangat intens di tengah-tengah

masyarakat. Dari situlah, al-Ghazālī melihat pentingnya pembentukan generasi baru dari para ulama yang memahami hakikat posisinya sebagai ulama diikuti dengan perbaikan metode pendidikan dan pengajaran. Tak lupa pula, al-Ghazālī selalu mengingatkan para pemimpin yang yang berbuat kezaliman terhadap rakyatnya (*naqd al-salāḥīn al-ẓulmah*). Metode yang serupa juga diikuti oleh al-Jīlānī yang mengutamakan pendidikan ruh (*al-tarbiyah al-rūḥiyyah*) dan pendidikan kemasyarakatan (*al-tarbiyah al-ijtimā'iyah*). Ia juga selalu menasehati para pemimpin dan ulama' untuk memahami peran dan fungsinya agar tercipta keadilan dalam masyarakat luas. Gerakan yang dilakukan oleh keduanya, lanjut al-Kīlānī, berpengaruh luas sampai berdirinya *daulat al-Zankiyyah*.

Politik masa modern bagaikan rumah yang kotor, lalu seorang harus memasuki rumah tersebut untuk membersihkannya, adalah pengibaratan yang terlalu dangkal dan sangat sederhana. Politik bukanlah rumah saja, namun ia juga berpenghuni beberapa orang yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Ada yang mengurus ruang tamu, ruang makan, ruang tengah dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mengurus rumah tersebut dipilih oleh masyarakat yang ingin agar rumah tersebut terurus dan menyejahterakan. Masyarakat ingin agar rumah tersebut membawa kemanfaatan bagi mereka sehingga hidup mereka terjamin dan keadilan tercipta. Jika rumah dan pengurusnya itu tidak beres dan sebagian mereka sudah menjadi 'tikus berdasi', lalu bagaimana caranya membersihkan rumah tersebut? Apalagi jika kita melihat fakta bahwa ternyata rumah tersebut tidak membawa kemanfaatan besar bagi masyarakat, bahkan tidak berfungsi untuk menjaga masyarakat. Akankah ulama' turun tangan dengan memasuki rumah tersebut dan 'membabat habis' para pengurus yang tidak becus?

Menyikapi masalah tersebut, sebagian tentu berpendapat bahwa memang ulama' lah yang harus masuk rumah politik tersebut untuk memberi contoh konkrit bagaimana berpolitik secara Islam lalu mengubah 'tikus berdasi' menjadi manusia secara hakiki. Asumsi dari pendapat ini adalah, apabila ulama hanya berfungsi sebagai poros penengah dalam kancah kontestasi politik, maka keadaan perpolitikan akan menjadi kering karena diisi oleh kecendrungan mainstream politik yang sama tanpa ada pembeda. Jika ulama' berada dalam arena politik, maka ia akan menjadi warna tersendiri, dan setidaknya dapat mencegah kemunkaran berlebihan yang dilakukan oleh pemimpin atau wakil rakyat.

Bukankah ulama' itu mencerminkan wajah Islam sehingga kedamaian dan keteduhan yang dipancarkannya dapat 'berbuah manis' dalam politik? Inilah nampaknya yang menjadi pendapat beberapa pihak, yang terjun ke dunia politik.

Asumsi kurang tepat jika melihat sistem politik zaman modern yang sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Islam. Apakah pantas seorang ulama' masuk dalam sistem itu dengan dalih ingin memperbaiki sistem atau orang dalam system tersebut? Jika para ulama' diharuskan atau setidaknya diperbolehkan berpolitik secara praktis, maka kemungkinan akan muncul stigma dalam masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh para ulama mempunyai muatan ideologi politik tertentu. Stigma negatif seperti ini wajar muncul karena konstelasi politik tidak mengenal *win-win solution*, yang ada hanya *win, win and win* (menang, menang dan menang).

Sama halnya ketika seorang petinju memasuki ring untuk bertinju, maka yang terpikirkan adalah cara bagaimana agar dirinya menang melawan yang lain. Nah, arena politik juga demikian, setiap yang memasukinya akan berpikir bagaimana caranya memenangkan suara rakyat, bahkan ia berusaha sekuat tenaga agar dirinya terpilih lalu berkampanye kemana-mana bahwa diri atau partainya yang paling pantas untuk menang, bukan partai lain sekalipun partai lain itu berbasis Islam. Maka disinilah munculnya fenomena "menjual agama untuk politik". Ulama' yang semacam ini tentu sudah tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang baik, malah sebaliknya ia sengaja melakukan pembodohan karena hanya mengatakan bahwa dirinya yang pantas dan seolah 'menutup mata' dari kebaikan calon pemimpin lain.

Maka metode yang dilakukan oleh para ulama' terdahulu bisa menjadi contoh yang baik bagi kita pada zaman ini. Di saat sistem politik sudah jauh dari nilai-nilai keislaman, langkah yang pertama bukanlah mengubah sistem tersebut dengan sistem yang baru secara membabi-butu tanpa kesiapan masyarakat untuk menerima sistem baru tersebut. Mempersiapkan masyarakat agar memahami system baru (dalam hal ini system politik Islam) adalah langkah utama bagi para ulama'. Persiapan tersebut tentu melalui jalur pendidikan yang dilancarkan secara kreatif dan aktif dengan tetap berpegang nilai

Islam. Ketika itulah sebenarnya ulama' juga berpolitik, bahkan berpolitik tingkat tinggi. Dalam hal ini pantaslah kita mengingat statemen dari seorang pimpinan Pondok Modern yang menyatakan bahwa ulama' dan pesantrennya tetap 'berpolitik untuk tidak berpolitik'. Ia memahami bahwa pendidikan adalah politik tingkat tinggi yang lebih hebat pengaruhnya daripada politik praktis, dan itulah jalan para ulama' kita.

I. Kesimpulan

Harapan masyarakat Muslim kepada para ulama cukup tinggi, karena saat ini kepada para ulamalah diharapkan dapat memberikan pencerahan yang menyejukkan, sebagai contoh dan tauladan, sebagai tempat bertanya dan sekaligus dapat memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi.

Seorang ulama boleh saja terjun kepada politik praktis dan menjadi penguasa (pemimpin) namun bila menjadi pemimpin harus berlaku adil, jujur, bersahaja, tidak memamerkan kemewahan duniawi dan tidak korupsi. Jika ini dapat dilakukan maka akan menambah simpatik, bukan hanya dikalangan umat Islam namun juga orang yang diluar Islam bahkan mungkin akan tertarik dan masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang muallaf. Sebaliknya resiko yang akan dihadapi seorang ulama yang terjun kepada politik praktis dan menjadi penguasa bila tidak berlaku adil, tidak jujur, tidak bersahaja, jauh dari masyarakat, memamerkan kehidupan dunia dan korupsi akibatnya bukan hanya kepada "seorang ulama yang buruk" itu saja yang menjadi cercaan bahkan kepada umat Islam seluruhnya turut menanggung malunya.

Dalam hal mendukung dan tidak mendukung calon legeslatif maupun eksekutif , bila yang menjadi calon itu sama-sama beragama Islam sebaiknya posisi ulama netral dan tidak menunjukkan politik secara praktis, jika ingin tetap dihormati dan manambah kharisma keulamaannya. Namun jika memilih ada dua calon legeslatif maupun eksekutif yang satu beraga Islam dan yang satu lagi tidak beragama Islam maka ulama sebaiknya berpolitik praktis mendukung calon yang beragama Islam.

Wallahu a'lamu bi alsawab

DAFTAR BACAAN

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din, (Mesir: Dar al-Sya'b, tt), juz 1.*
- Abu Ja'far, *Tarikh at-Thabari*, jil. III (Kairo: Daar Maarif , 1963).
- Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi* (Bandung : Mizan, 1993).
- Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, Terj. H. Afandi, Hasan Asari, (Jakarta: Logos, 1994).
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Deliar Noer, (2012). In Jaap Erkelens. *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*, ([Jakarta](#): Gramedia Pustaka Utama).
- Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. ([Jakarta](#): Gramedia 2012).
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Husain Haikal, *Abu Bakar al-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdawi (Solo: Pustaka Mantiq, 1994).
- Ilzamudin Ma'mur, [Abul Ala Mawdudi and Mohammad Natsir's Views on Statehood: A Comparative Study - Masters in Art thesis](#), (Montreal: McGill University, 1995).
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies. (Sejarah Sosial Umat Islam)*, terjemah Ghufroon A. Mas'adi (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999).
- Irfan Safrudin,. *Ulama-ulama Perintis: Biografi Pemikiran dan Keteladanan*. (Bandung: Majelis Ulama Indonesia, 2008).
- John L.Espito, *The oxford encyclopedia of the Modern Islame World Vol 4* (New York: Oxford University Press, 1995).

- John M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, P.T. Gramedia, 1996).
- K. Ali, *Study of Islamic Story* (Delhi: Idarah Adabiyah, 1980).
- M. Dzulfikriddin, [Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia](#), (Bandung: Mizan, 2010).
- M. Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi Sistem Tradisional Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- M. Ridha. *Ali Bin Abi Tahalib Rabi' Al-Khulafa'*, (Beirut: Daar Kutub, 1982).
- M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengan Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Majid Irsan al-Kilana, *Hakadha 'Uahara Jil Qalah Al-Din Wa Hakadha Adat Al-Quds*, (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, 1985).
- Marshall Hodgson, *The Venture Of Islam*, jil. I. (Chicago: Chichago University Press, 1974).
- Mujiono, *Keterlibatan Kiai Dan Ustadz dalam Politik Praktis Keterlibatan Kiai Dan Ustadz dalam Politik Praktis Di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadin Limpung Batang Dan Implikasinya Terhadap Minat Belajar Santri. Skripsi*. (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009).
- Munir al-Din Ahmed, *Muslim Edication And The Scholar Social Status Up To The 5 TH Century (11 th Century cristian Era) in the light of Tarikh Bagdad*, (Verlag der Islam, Zurich, 1968).
- Nouruzaaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).
- Qasim Shahab Qabbah, al-Ulama manarat al-hukkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008).
- [Republika](#). 26 November 2011. Diakses 11 April 2014.
- Rosnani Hashim,. *Reclaiming the Conversation: Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago*. (The Other Press, 2010).
- S.H.M.Jafri, *Dari saqifah Sampai Imamah*, terj Kieraha (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995).
- Setiadi, Purwanto; dkk.. *Douwes Dekker:Sang Inspirator Revolusi*. KPG (Jakarta, Gramedia 2012).
- Stanley Milgram, *Obedience To Authority: An Experimental View*, (Francis, Taylor ,1974).
- Taufik Rahzen, *Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia*, (Jakarta: Blora Institute, 2007).
- Thohir Luth, [M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya](#), (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Tim Penyusun Ensiklopedi. *Insklopedi Islam* (Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Wasvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Perilaku dan Peristiwa*. ([Jakarta](#), Penerbit Buku Kompas, 1999).